



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
BADAN KEUANGAN

---

# **RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN**

**TAHUN 2021 – 2026**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagai acuan utama Renstra Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Badan Keuangan Kota Bukittinggi sebagai salah satu unit kerja teknis menyusun Renstra Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Badan keuangan Kota Bukittinggi ini disesuaikan dengan struktur organisasi dan tata kerja Badan keuangan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016.

Salah satu kondisi yang menjadi perhatian Badan Keuangan dalam rangka penyusunan Renstra Badan Keuangan Tahun 2021-2026 adalah merebaknya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia pada awal tahun 2020 yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 yang meluas di berbagai negara memiliki dampak keekonomian yang perlu diantisipasi dan direspons oleh seluruh negara termasuk Indonesia.

Secara substansi Renstra Badan Keuangan ini memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagai panduan utama pelaksanaan aktivitas Badan Keuangan Kota Bukittinggi tahun 2021- 2026. Materi operasional yang terkandung dalam renstra ini merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Badan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berupa perumusan teknis dan pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kota.

Disamping itu juga dapat dipergunakan untuk pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta sebagai dasar pelaporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan tolak ukur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Bukittinggi, Agustus 2021

  
KOPALA BADAN KEUANGAN  
**HERRIMAN, SH.M.Hum**  
NIP. 19680525 199308 1001

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	1.1 Latar Belakang.....	-1
	1.2 Landasan Hukum.....	-2
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	-3
	1.4 Sistematika penulisan.....	-3
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN</b>	
	2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi.....	-5
	2.2 Sumber Daya.....	-8
	2.3 Kinerja Pelayanan.....	-9
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	-14
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN</b>	
	3.1 Identifikasi masalah berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.....	-19
	3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	-20
	3.3 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan.....	-27
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah.....	-28
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	-28
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN, SASARAN BADAN KEUANGAN</b>	
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	-30
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	-34
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	-37
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN FUNGSI PENUNJANG</b>	-59
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	-61

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan.....	-11
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan.....	-13
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan keuangan.....	-19
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Keuangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	-21
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan SKP.....	-32
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	-36
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	-39
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Sasaran SKPD.....	-53

## B A B 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memanfaatkan seluruh pengetahuan dan keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya, untuk mengantisipasi perubahan dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis regional, nasional dan global.

Perencanaan Strategis sering juga disebut Perencanaan Jangka Panjang (*Long Range Planning*) adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan jangka panjang organisasi, kebijakan yang harus diperhatikan, serta strategi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk melaksanakan strategi tersebut harus pula disusun program kerja yang terinci, mencakup kegiatan yang harus dilakukan, kapan harus dimulai, kapan harus selesai, dan siapa yang harus bertanggung jawab serta sumber daya manusia yang diperlukan, singkatnya perencanaan strategis adalah proses perencanaan jangka panjang yang sudah diformalkan, yang digunakan untuk merumuskan tujuan organisasi serta cara menghadapinya.

Perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja sesuai dengan tuntutan perubahan dan masyarakat maupun *stakeholders* dan mampu menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat.

Sebagian dari pekerjaan perencanaan strategis terfokus kepada apakah organisasi mempunyai sumber daya dan kapabilitas yang memadai untuk menjalankan misinya dan mewujudkan visinya. Pengenalan akan kekuatan yang dimiliki akan membantu organisasi untuk tetap menaruh perhatian pada kelemahan-kelemahan yang ada akan memberikan bobot realisme pada rencana-rencana yang akan dibuat organisasi.

Pada sisi lain terdapat kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang mempengaruhi operasi dan kinerja organisasi tersebut. Kemampuan atau ketidakmampuan untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan utama di luar organisasi akan sangat menentukan apakah organisasi akan berhasil atau gagal menjalankan misinya dan mewujudkan visinya.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Panjang Menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Keuangan Kota Bukittinggi menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Badan Keuangan Kota Bukittinggi yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kota Bukittinggi.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi

rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

- Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Badan Keuangan tahun 2021– 2026 adalah:

1. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel;
2. Menjabarkan visi, misi dan program yang dilaksanakan Badan Keuangan dalam lima tahun mendatang dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan tujuan dalam RPJMD;
3. Sebagai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja Badan Keuangan sebagai institusi;
4. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan.

Sedangkan tujuan dalam penyusunan Renstra Badan Keuangan Tahun 2021-2026 adalah:

1. Meletakkan landasan yang kuat bagi terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang efektif, efisien, transparan, terarah dan terkendali untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
2. Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun ke depan, guna mencapai sasaran strategis yang ditetapkan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Badan Keuangan Kota Bukittinggi 2021-2026 ini terdiri dari 8 (delapan) bagian, yaitu:

- |          |   |
|----------|---|
| BAB I    | Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan;   |
| Bab II   | Gambaran Pelayanan Badan Keuangan mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Keuangan, Sumber Daya Badan keuangan, Kinerja Pelayanan Badan Keuangan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan;   |
| Bab III  | Permasalahan dan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra kementerian dan Lembaga , serta Telaahan RTRW yang akan mempengaruhi pelayanan perangkat daerah; |
| Bab IV   | Tujuan dan Sasaran, mencakup: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD;  |
| Bab V    | Strategi dan Arah Kebijakan mencakup ; strategi dan kebijakan Badan Keuangan;   |
| Bab VI   | Rencana Program dan Kegiatan mencakup ; rencana program dan kegiatan serta pendanaan Badan Keuangan;  |
| Bab VII  | Kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang Badan Keuangan mencakup kinerja penyelenggaraan perangkat daerah;  |
| Bab VIII | Penutup.  |



## **B A B II**

### **GAMBARAN UMUM BADAN KEUANGAN**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Badan Keuangan Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, serta Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan dengan tugas pokok “Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan di bidang penunjang urusan pemerintah bidang keuangan”.

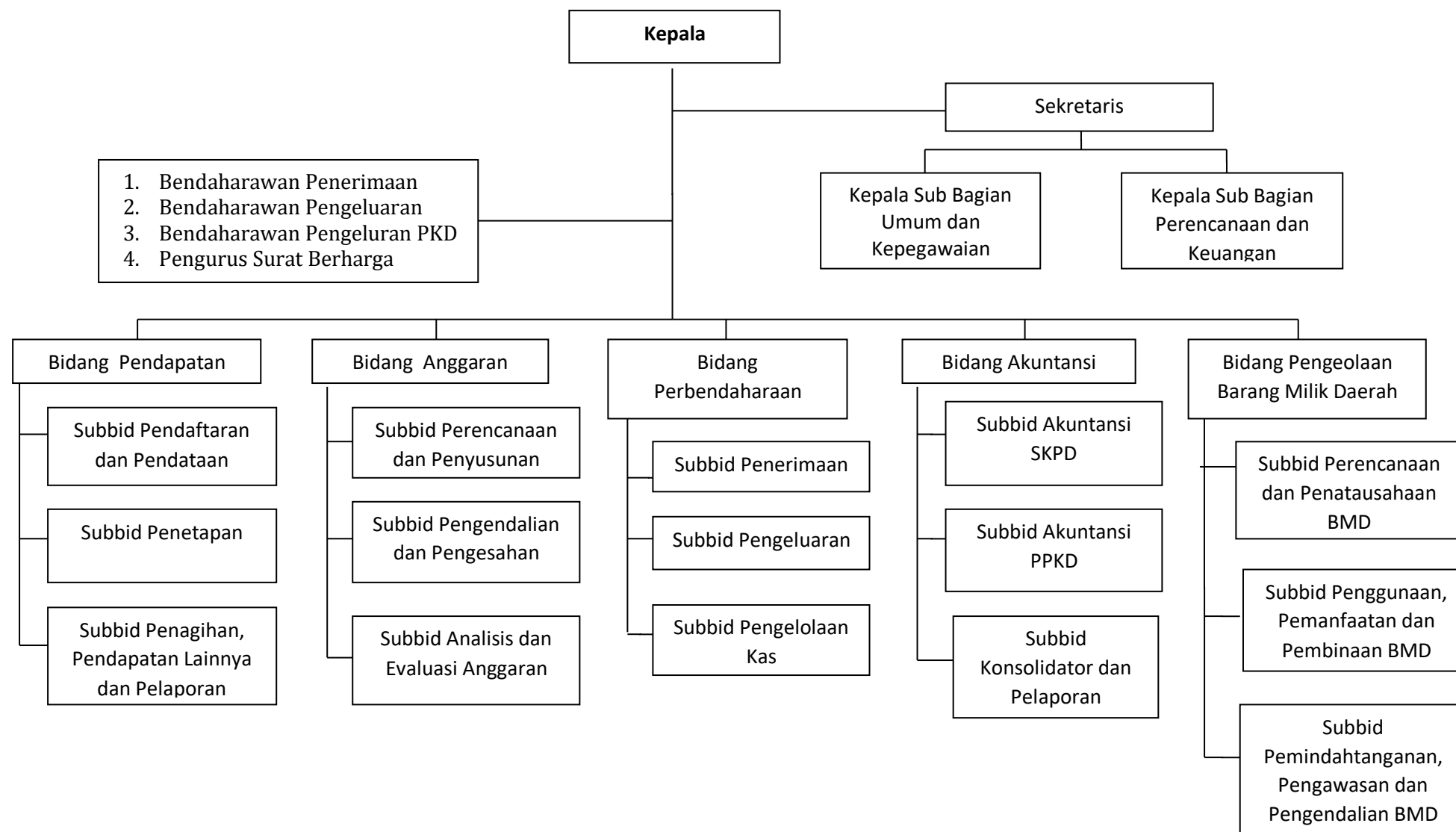
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Keuangan Kota Bukittinggi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja Badan (Tapkin).
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, pelaksanaan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang keuangan.
- e. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- f. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- g. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- h. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang pendapatan asli daerah, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan bidang pengelolaan barang milik daerah.
- j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 2 Desember 2016, maka struktur organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris yang membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bagian yaitu:
  - a. Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Ka. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Ka. Bidang Pendapatan yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bidang yaitu:
  - a. Ka. Subid pendaftaran dan pendataan
  - b. Ka. Subid Penetapan
  - c. Ka. Subid penagihan, pendapatan lainnya dan pelaporan
4. Kepala Bidang Anggaran Membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bidang yaitu:
  - a. Ka. Subbid perencanaan dan penyusunan anggaran
  - b. Ka. Subbid pengendalian dan pengesahan anggaran
  - c. Ka. Subbid analisis dan evaluasi anggaran
5. Kepala Bidang Perbendaharaan membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bidang yaitu:
  - a. Ka. Subbid penerimaan
  - b. Ka. Subbid pengeluaran
  - c. Ka. Subbid pengelolaan kas
6. Kepala Bidang Akuntansi membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bidang yaitu:
  - a. Ka. Subbid akuntansi SKPD
  - b. Ka. Subbid akuntansi PPKD
  - c. Ka. Subbid konsolidator dan pelaporan
7. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bidang yaitu:
  - a. Ka. Subbid Perencanaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah
  - b. Ka. Subbid penggunaan, pemanfaatan, dan pembinaan Barang Milik Daerah
  - c. Ka. Subbid Pemindahtanganan pengawasaan dan pengendalian Barang Milik Daerah
8. Unit Pelaksana Teknis Badan

# SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI BERDASARKAN PERWAKO NO. 55 TAHUN 2016



## 2.2. Sumber Daya

### 2.2.1. Pegawai

Sumber daya manusia, yang kemudian disingkat SDM, merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk Sosial. SDM lebih dimengerti manusia yang bekerja di lingkungan organisasi. Sumber daya manusia aparatur Badan Keuangan keadaan sampai dengan 31 Desember 2020 adalah :

#### Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Golongan	Keadaan 1 Januari 2020	Keadaan 31 Desember 2020
IV	7	7
III	57	56
II	11	8
I	0	0
Non PNS	12	13
Jumlah	87	84

#### Pendidikan Formal

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2020	Keadaan 31 Desember 2020
S3	-	-
S2	9	8
S1	44	44
D III	16	14
D II	-	-
D I	-	-
SLTA	17	17
SLTP	-	-
SD	1	1
LAINNYA		
Jumlah	87	84

**Diklat Penjenjangan**

<b>Pendidikan</b>	<b>Keadaan 1 Januari 2020</b>	<b>Keadaan 31 Desember 2020</b>
Pim I	-	-
Pim II	-	-
Pim III	6	5
Pim IV	15	15

**Jabatan**

<b>Pendidikan</b>	<b>Keadaan 1 Januari 2020</b>	<b>Keadaan 31 Desember 2020</b>
Struktural	24	23
Kepala Badan	1	1
Sekretaris	1	1
Kabid	5	5
Kasubag	2	2
Kasubid	15	14
Fungsional Tertentu	1	3
Staf	62	58

Rincian jumlah Pegawai sebagaimana terdapat dalam lampiran.

**2.2.2. Aset**

Aset tetap yang terdapat pada Badan Keuangan sebagai berikut

- Tanah : Rp6.139.500.000,00
- Peralatan dan mesin : Rp9.031.862.341,00
- Gedung dan bangunan : Rp2.820.387.644,00
- Aset tetap lainnya : Rp9.180.720,00

Total aset yang dimiliki dengan nilai Rp18.000.930.705,00

**2.3. Kegiatan Pelayanan**

Badan Keuangan sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban

APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administratif dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan aset daerah.

I. Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Pelayanan realisasi pencairan dana bantuan sosial
2. Pelayanan realisasi pencairan dana hibah
3. Pelayanan SP2D non gaji
4. Pelayanan SP2D gaji
5. Pelayanan SPJ bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
6. Pelayanan penyusunan anggaran
7. Pelayanan asistensi Rencana Kerja Anggaran

II. Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah meliputi:

1. Pelayanan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
2. Pelayanan pendaftaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3. Pelayanan pendaftaran pajak reklame
4. Pelayanan pendaftaran PBB-P2 baru, pecah, gabung, salinan dan mutasi
5. Pelayanan perforasi bill, tiket, karcis pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
6. Pelayanan pembayaran pajak hotel tahun berjalan
7. Pelayanan pembayaran pajak restoran tahun berjalan
8. Pelayanan pembayaran pajak hiburan tahun berjalan
9. Pelayanan pembayaran pajak reklame tahun berjalan
10. Pelayanan pembayaran pajak BPHTB tahun berjalan
11. Pelayanan pembayaran pajak PBB-P2 tahun berjalan
12. Pelayanan pembayaran piutang pajak daerah
13. Pelayanan pembayaran pajak daerah dan piutang pajak daerah (selain PBB) berdasarkan keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah
14. Pelayanan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah
15. Pelayanan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah.

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Badan Keuangan	Target NSP K	Target IK K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	V	V	V	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	V	V	V	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%	11,00%	6,89%	7,77%	9,54%	10,02%	7,27%	98,43%	97,13%	106,00%	100,02%	66,09%

Capaian Indikator Kinerja Utama Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi secara berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Berdasarkan tabel tersebut, dilihat dari realisasi kinerja, perbandingan realisasi kinerja tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020, pada Sasaran II Persentase PAD terhadap pendapatan daerah mengalami kenaikan dari tahun pertama Renstra sampai dengan tahun keempat, pada tahun kelima terdapat penurunan capaian, hal ini disebabkan Adanya pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat untuk menekan angka persebaran kasus Covid-19. Berkurangnya aktivitas masyarakat akibat merebaknya wabah corona virus disease (covid-19) berdampak terhadap lesunya sendi-sendi perekonomian di Kota Bukittinggi, imbas lesunya kegiatan ekonomi pasca diterapkannya kebijakan pemerintah yang meminta agar masyarakat berdiam diri di rumah selama darurat Covid-19 ini berdampak terhadap pemerintah daerah, khususnya dari pajak maupun potensi pendapatan asli daerah (PAD).



**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Keuangan**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	%	%	%	%	%	%	%
<b>BELANJA</b>	<b>9.091</b>	<b>31.801</b>	<b>115.959</b>	<b>31.720</b>	<b>22.285</b>	<b>26.517</b>	<b>26.067</b>	<b>102.463</b>	<b>27.352</b>	<b>20.071</b>	<b>91,15</b>	<b>81,97</b>	<b>88,36</b>	<b>86,23</b>	<b>90,06</b>	<b>(23)</b>	<b>(24)</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>14.191</b>	<b>13.549</b>	<b>97.621</b>	<b>13.796</b>	<b>8.540</b>	<b>13.063</b>	<b>11.224</b>	<b>86.757</b>	<b>12.852</b>	<b>8.276</b>	<b>92,05</b>	<b>82,84</b>	<b>88,87</b>	<b>93,16</b>	<b>96,92</b>	<b>(40)</b>	<b>(37)</b>
Belanja Pegawai	14.191	13.549	97.621	13.796	8.540	13.063	11.224	86.757	12.852	8.276	92,05	82,84	88,87	93,16	96,92	(40)	(37)
<b>Belanja Langsung</b>	<b>14.900</b>	<b>18.251</b>	<b>18.338</b>	<b>17.923</b>	<b>13.745</b>	<b>13.454</b>	<b>14.842</b>	<b>15.705</b>	<b>14.499</b>	<b>11.794</b>	<b>90,29</b>	<b>81,32</b>	<b>85,64</b>	<b>80,90</b>	<b>85,81</b>	<b>(8)</b>	<b>(12)</b>
Belanja Pegawai	8.847	9.214	10.124	10.694	9.336	8.470	8.263	9.082	8.651	8.175	95,73	89,67	89,71	80,90	87,56	6	(3)
Belanja Barang dan Jasa	4.783	7.727	7.320	6.729	4.240	3.964	5.466	5.915	5.437	3.464	82,90	70,74	80,80	80,81	81,71	(11)	(13)
Belanja Modal	1.269	1.308	893	500	168	1.018	1.112	707	410	155	80,25	85,02	79,22	81,97	91,75	(87)	(85)

Dari tabel diatas rasio antara realisasi dan anggaran berfluktuasi dalam rentang 88 persen sampai dengan 91 persen, capaian tertinggi terdapat pada tahun 2016 yaitu 91,15 persen dan terendah pada tahun 2017 sebesar 81,97 persen. Rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar (23) persen, sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar (24) persen.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan**

Berdasarkan analisis terhadap rencana strategis Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan hasil telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Badan Keuangan pada lima tahun mendatang, dimana tantangan dan peluang tersebut sebagai berikut :

##### **a. Tantangan**

1. Situasi pandemi Covid-19 yang belum mereda serta kewenangan yang berkurang akibat Undang-Undang Cipta Kerja membuat tantangan bagi pemerintah daerah semakin berat, daerah harus berinovasi agar mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di tengah keterbatasan. Disamping itu pemerintah daerah juga harus melakukan perencanaan dan penganggaran terarah pada implementasi UU Cipta Kerja. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kesiapan sumber daya manusia, pelayanan terpadu satu pintu, dan pelayanan secara daring.
2. Terjadinya perubahan perangkat daerah dan mutasi sehingga menimbulkan dampak psikologis pada aparatur. Perubahan struktur organisasi tata kerja akibat adanya beberapa perubahan peraturan yang dilahirkan oleh Pemerintah seperti pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB dan PBB P2 sehingga fungsi-fungsi tersebut harus diakomodir dalam struktur organisasi. Disisi lain terjadinya mutasi dan promosi yang menimbulkan dampak psikologis pada aparatur, disamping itu pejabat pengelola keuangan daerah tidak bisa dilakukan secara instan namun harus dimulai dari bawah sehingga pejabat lebih memahami pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan telaahan dengan kebijakan yang akan diambil atau ditetapkan oleh kepala daerah.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam membayar pajak dan retribusi daerah. antara lain pemungutan pajak restoran yang seharusnya dilakukan oleh pengelola rumah makan atau restoran kenyataan masih banyak yang tidak melakukan hal ini dan kasus-kasus lainnya seperti pembayaran PBB.

4. Kurangnya personil yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan teknologi informasi. Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), SDM ini bukan hanya kebutuhan Badan Keuangan tetapi juga kebutuhan seluruh OPD. Di sebagian besar OPD ini menjadi persoalan termasuk staf yang membuat laporan keuangan OPD dan mengurus barang milik daerah serta personil yang menguasai teknologi informasi. Hal ini akan bisa menjadi ancaman apabila kondisi ini tidak terbenahi karena pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah mulai berbasis teknologi informasi dengan diimplementasikannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

#### **b. Peluang**

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengelola potensi yang ada. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta diikuti dengan Undang-undang lainnya seperti Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menggali potensi yang ada dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, namun sepanjang yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Disamping sumber-sumber pendapatan asli daerah, pendanaan lainnya yang digunakan untuk pembangunan daerah adalah dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
2. Adanya komitmen yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Komitmen pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang secara terus menerus mengupayakan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dengan memberikan punish dan reward terhadap pemerintah daerah yang pengelolaan keuangan daerahnya dinilai baik seperti memberikan dana insentif daerah dan memberikan sanksi bagi daerah yang terlambat penetapan perda APBD dengan melakukan penundaan terhadap transfer Dana Alokasi Umum.
3. Tersedianya anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui kementerian terkait dan Propinsi Sumatera Barat. Pemerintah setiap tahun mengalokasikan

dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak kepada daerah, sepanjang penerimaan negara mengalami peningkatan maka penerimaan daerah dari dana transfer ini juga meningkat, sehingga dapat membiayai kebutuhan belanja aparatur maupun belanja pembangunan bagi peningkatan pelayanan masyarakat. Disamping itu, Pemerintah Propinsi juga mengalokasikan dana bagi hasil pajak untuk Kabupaten/kota dan alokasi dana lainnya baik berupa bantuan keuangan maupun dana dekonsentrasi.

Berdasarkan hal di atas, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Keuangan dengan melakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Badan Keuangan untuk kurun waktu (lima) tahun ke depan sebagaimana matrik berikut :

## Matrik SWOT Badan Keuangan

<div>Internal</div> <div>Eksternal</div>	<b><u>Kelemahan</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur</li> <li>2. Kurangnya koordinasi antar bidang</li> <li>3. Kurangnya disiplin aparatur</li> <li>4. Kurangnya sarana dan prasarana</li> <li>5. Kurangnya personil yg memiliki keahlian di bidang keuangan dan TI</li> </ol>	<b><u>Kekuatan</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda dan Perwako</li> <li>2. Adanya dukungan pimpinan</li> <li>3. Adanya kemauan dan keinginan dalam melaksanakan tugas</li> <li>4. Tersedianya dana operasional</li> <li>5. Tersedianya kesempatan untuk peningkatan kompetensi aparatur</li> </ol>
<b><u>Ancaman</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjadinya perubahan SOTK dan mutasi sehingga menimbulkan dampak psikologis pada aparatur</li> <li>2. Kurangnya kesadaran masyarakat &amp; dunia usaha dlm membayar pajak/retribusi</li> </ol>	<p>W + T = Penghambat Mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman</p>	<p>S + T = Status Quo Menggunakan Kekuatan untuk mencegah ancaman</p>
<b><u>Peluang</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya per UU yg memberikan keleluasaan bagi daerah utk mengembangkan potensi</li> <li>2. Adanya komitmen yg sama antara pemerintah pusat, Pemerintah provinsi dan pemerintah daerah</li> <li>3. Tersedianya anggaran dari Pemerintah</li> <li>4. Adanya tuntutan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah</li> </ol>	<p>W + O = Status Quo Mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang</p>	<p>S + O = Pendorong Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang</p>

Untuk meminimalisir ancaman dan kelemahan dan mengubahnya menjadi kekuatan dan peluang maka Badan Keuangan untuk 5 (lima) Tahun kedepan perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, disiplin dan taat azas;
2. Meningkatkan pelayanan keuangan daerah yang efektif dan efisien;
3. Meningkatkan Pendapatan daerah dari pajak dan retribusi ;
4. Meningkatkan penataan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
5. Meningkatkan penataan sistem dan prosedur pengelolaan Aset daerah;
6. Meningkatkan pengembangan standar pelayanan minimum (SPM) organisasi;
7. Meningkatkan kemampuan managerial dan teknis aparatur;
8. meningkatkan disiplin dan motivasi kerja aparatur;
9. Meningkatkan kesejahteraan aparatur;
10. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur;
11. Meningkatkan pelayanan informasi dan akses pemanfaatan informasi.

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN

Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada SKPD. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

##### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan

Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Walikota terpilih, Kajian terhadap Renstra Kementerian Keuangan republik Indonesia kajian terhadap RTRW, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel berikut ini ;

**Tabel 3.1**

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan keuangan**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
Aspek Kelembagaan	Struktur Organisasi Badan Keuangan telah mengakomodir tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan	UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	-	-	-
Aspek Regulasi	Regulasi yang dibuat telah sesuai dengan aturan yang lebih tinggi	Permenkeu, Permendagri	Optimalisasi mekanisme dan tata kerja dengan prosedur yang efektif dan efisien	Ketepatan waktu pelaksanaan	Belum optimalnya mekanisme dan tata kerja dengan sistim dan prosedur yang efektif dan efisien

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kota Bukit Tinggi tahun 2021 – 2026, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah:

**Visi :** “Menciptakan Bukittinggi HEBAT, Berdasarkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”

HEBAT selain sebagai ungkapan yang menunjukkan keunggulan, ketauladanan dan bermartabat juga merupakan akronim dari :

H= Humanis

E= Entrepreneurship

B= Bijak

A= Agamais/ Adil

T= Tauladan.

Sementara itu adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah merupakan ungkapan yang akan menjiwai seluruh upaya pencapaian visi tersebut. Artinya falsafah Minangkabau tersebut dijadikan acuan dan panduan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan yang akan disusun dan dilaksanakan mestilah tidak bertentangan dengan norma norma adat yang telah didasarkan pada kitab suci Al Qur’an.

Badan Keuangan Kota Bukittinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi yang serasi dan selaras dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dalam bidang pengelolaan keuangan baik secara makro maupun secara mikro.

#### **Misi :**

Berdasarkan pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam RPJMD Kota Bukit Tinggi 2021-2026, maka Badan Keuangan Kota Bukittinggi akan mendukung pelaksanaan Misi **Kelima** yaitu “HEBAT Dalam Tata Kelola Pemerintahan”, sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Bukittinggi.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Badan Keuangan Kota Bukittinggi menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut dalam tabel berikut ini



**Tabel. 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Keuangan**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah**  
**dan Wakil Kepala Daerah**

No.	Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Tugas Pokok	Permasalahan		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Visi : Menciptakan Bukittinggi HEBAT, Berdasarkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah  Misi 5: Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan  Tujuan:	Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan di bidang penunjang urusan pemerintah bidang keuangan	1	Penetapan APBD belum sesuai jadwal yang ditetapkan;	1. Dinamika regulasi/perubahan Kebijakan pemerintah pusat  2. Keterbatasan jumlah dan kualitas kemampuan SDM, sehingga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan	1. Peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan dan asset  2. Kebijakan dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah  3. Sistem pengelolaan
			2	Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam Evaluasi Gubernur atas RAPBD Kota Bukittinggi		
			3	Kurangnya instrumen penganggaran/ Peraturan/ Juklak/ Juknis/ SOP yang digunakan dalam proses penyusunan APBD;		
			4	Kurangnya pemahaman SKPD dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD);		
2.						

No.	Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Tugas Pokok	Permasalahan		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
3.	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 2. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah  Sasaran: 1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih 2. Meningkatkan Kontribusi PAD		5	Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan ketelitian Tim Asistensi/ verifikasi dalam memeriksa/ memverifikasi Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD		keuangan dan aset daerah yang lebih baik.
			6	SKPD masih belum mematuhi aturan tentang batas akhir pencairan pada akhir tahun;		
			7	Belum adanya sistem aplikasi untuk penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah yang terhubung antara Pengelola Kas Daerah dan Bank Persepsi;		
			8	Perlunya koordinasi secara simultan antara pengelola Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD dan Bank;		
4.			9	Masih kurangnya instrumen Peraturan/ Juklak/ Juknis yang digunakan dalam proses penerimaan		

No.	Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Tugas Pokok	Permasalahan		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				dan pengeluaran APBD.		
			10	Pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran.		
			11	Lambatnya laporan pemutakhiran data pegawai terkait dengan gaji dan tunjangan anak sehingga sering terjadi kelebihan pembayaran tunjangan keluarga di mana sebagian besar ditemukan oleh auditor, dikarenakan SKPD kurang menanggapi respon tersebut dengan baik.		
			12	Kurangnya ruang penyimpanan arsip keuangan padahal arsip keuangan berlaku sampai dengan 20 tahun		
			13	Masih banyak SDM Pengelola Akuntansi di SKPD yang bukan berlatar belakang pendidikan Akuntansi sehingga masih memerlukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan;		

No.	Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Tugas Pokok	Permasalahan		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			14	Peraturan yang terkait dengan standar akuntansi pemerintah masih harus adanya penyesuaian;		
			15	Kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset terhadap penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual.		
			16	Belum adanya Road Map untuk menyelesaikan permasalahan aset;		
			17	Regulasi terkait pengelolaan aset belum memadai		
			18	Belum optimalnya akurasi data aset pada tiap-tiap SKPD;		
			19	Pensertifikatan Aset berupa Lahan milik Pemerintah Kota Bukittinggi belum optimal terkait warkah bukti kepemilikan		
			20	Prosedur pencatatan BMD belum memadai;		

No.	Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Tugas Pokok	Permasalahan		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			21	Belum optimalnya sinergitas sistem aplikasi pengelolaan aset untuk mendukung laporan keuangan secara akrual		
			22	Prosedur penilaian BMD belum memadai		
			23	Masih rendahnya kesadaran penyewa lahan /fasum terhadap kewajiban dalam membayar retribusi;		
			24	Kualitas sumber daya aparatur belum sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan unit kerja		
			25	Belum optimalnya penggalan potensi pajak daerah		
			26	Belum optimalnya kualitas data potensi pajak daerah		
			27	Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan pengelolaan pajak		

No.	Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Tugas Pokok	Permasalahan		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				daerah		
			28	Belum optimalnya penegakan hukum dalam pengelolaan pajak daerah		
			29	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan		
			30	Jumlah piutang pajak tidak tertagih makin meningkat tiap tahunnya		

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2020-2024

#### 3.3.1. VISI

Rumusan visi yang diangkat dalam Renstra Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 adalah **"Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong "**.

#### 3.3.2. MISI :

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

#### 3.3.3. TUJUAN

Sejalan dengan visi dan misi di atas telah ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Keuangan dalam periode waktu 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Berdasarkan visi, misi dan tujuan kementerian keuangan yang diuraikan diatas, dapat dijelaskan bahwasannya Tujuan Renstra Kementerian secara tidak langsung memberikan pengaruh kepada kinerja pelayanan Badan Keuangan Kota Bukittinggi dan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan secara nasional dapat dikaitkan dengan semua tujuan kementerian sebagaimana dijabarkan diatas.

### **3.4. Telaahan Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang–Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang kemudian diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh Undang – Undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan, bahkan cenderung sebaliknya yaitu adanya penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat secara kasat mata baik dikawasan perkotaan maupun perdesaan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang lazim diterapkan yaitu menekankan pada pendekatan telaahan dampak lingkungan dan pendekatan keberlanjutan yang berfungsi untuk menelaah efek dan atau dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan, sedangkan pendekatan keberlanjutan menekankan pada keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumber daya.

Badan Keuangan selaku Badan yang mengelola keuangan dan aset daerah utamanya adalah mengedepankan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif. Kajian Lingkungan Hidup strategis maupun kebijakan RTRW akan bisa mempengaruhi kebijakan Badan Keuangan selaku SKPD pengelola keuangan dan aset, dimana akan terjadi perubahan peruntukan lahan maupun kebijakan pembangunan berkelanjutan yang akan mempengaruhi penerimaan maupun pendapatan daerah.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan telaahan terhadap Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Telaahan Terhadap Visi dan Misi Walikota



Bukittinggi Tahun 2021-2026, Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang dijelaskan diatas, dirumuskan beberapa isu strategis yang akan dipecahkan melalui strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pada Badan Keuangan selama kurun waktu lima tahun, dimana pencapaiannya dibagi dalam rencana kerja Tahunan SKPD (Renja).

Adapun isu-isu strategis Badan Keuangan yang harus disikapi dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pada kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang besar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang kredible dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.
2. Pengembangan Teknologi Informasi Keuangan dan Aset Daerah terintegrasi yang diarahkan untuk mewujudkan tata kelola yang sesuai *best practice*, akurat, handal, terkini, dan mampu menyajikan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan.
3. Berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset daerah membutuhkan keseriusan Pemerintah Daerah untuk menata pengelolaannya, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan dan pengawasannya, diharapkan tata kelola tersebut dapat meminimalkan berbagai penyimpangan yang ada, termasuk temuan BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan setiap tahun anggaran.
4. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan dan belanja daerah relatif masih rendah sehingga pendapatan transfer masih memberi kontribusi terbesar.
5. Administrasi perpajakan masih lemah, terutama dalam hal penegakan prosedur dan kepatuhan pemungut pajak serta menyangkut kelembagaan, sistem dan prosedur (business process), termasuk dari aspek sumber daya manusia (baik dari segi jumlah maupun kemampuan), serta komputerisasi.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Pemerintah Kota Bukittinggi berusaha mewujudkan Visi “Menciptakan Bukittinggi HEBAT, Berdasarkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”, melalui Misi sebagai Berikut:

1. Hebat dalam sektor peningkatan ekonomi kerakyatan;
2. Hebat dalam sektor pendidikan;
3. hebat dalam sektor kesehatan dan lingkungan;
4. Hebat dalam sektor kepariwisataan, seni, budaya dan olahraga;
5. Hebat dalam tata kelola pemerintahan;
6. Hebat dalam sektor sosial kemasyarakatan
7. Hebat dalam sektor bidang pertanian

Badan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi ke 5 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, untuk melaksanakan Misi ini perlu adanya kerangka yang jelas berupa Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil program perangkat daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diuraikan pada Bab III sebelumnya, maka selanjutnya dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam 5 (lima) Tahun kedepan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Badan Keuangan.

##### **4.1.1 Tujuan**

Tujuan pembangunan yang dirumuskan merupakan penjabaran dari upaya pencapaian visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026. Adapun tujuan yang akan dicapai Badan Keuangan adalah

1. **Terwujudnya Pemerintahan yang bersih**, Indikator kinerja dari tujuan ini adalah Indeks Integritas Pemerintah Daerah

2. **Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah,**

Indikator kinerja dari tujuan ini adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tujuan ini selanjutnya akan diturunkan dalam bentuk rumusan sasaran sehingga langkah-langkah atau strategi dan arah kebijakan dapat lebih terukur.

#### **4.1.2 Sasaran**

Untuk dapat memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan sasaran pembangunan Jangka Menengah Badan Keuangan yaitu:

1. **Meningkatnya Efektifitas Kinerja Keuangan Daerah**, Indikator Kinerja Sasaran adalah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. **Meningkatnya Kontribusi PAD**, Indikator Kinerja Sasaran ini adalah Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Kota Bukittinggi sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Badan Keuangan Kota Bukittinggi, yang disajikan dalam tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja**  
**Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke..					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih	Meningkatnya Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	8%	9%	10%	11%	12%	13%

Dari tabel diatas, target yang ditetapkan Badan Keuangan untuk Tujuan Kesatu, Sasaran Kesatu dan Indikator Kinerja Kesatu yaitu: Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Opini WTP ditargetkan dari awal sampai dengan akhir tahun RPJMD.

Indikator Kinerja kedua dari Tujuan Kedua dan Sasaran Kedua yang ditetapkan adalah Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, adalah perbandingan antara jumlah seluruh penerimaan PAD yang dikelola Badan Keuangan selama satu tahun dengan jumlah penerimaan/pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah Kota Bukittinggi dalam satu tahun anggaran.

Seluruh penerimaan/pendapatan yang diterima dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
  - a. Pendapatan pajak daerah
  - b. Pendapatan retribusi daerah
  - c. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
  - a. Transfer Pemerintah pusat – dana perimbangan
  - b. Transfer pemerintah pusat – Dana penyesuaian dan otonomi khusus
  - c. Transfer pemerintah daerah lainnya (Provinsi)
  - d. Bantuan Keuangan

Target yang ditetapkan terhadap indikator kinerja kedua: Rasio PAD terhadap Pendapatan APBD yang dibawah ini disingkat R dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$R = \frac{PAD}{Pendapatan Daerah}$$

Target kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran kedua ini ditetapkan sebesar 8% diawal RPJMD dan 13% pada akhir tahun RPJMD 2021-2026.

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan adalah hasil perbandingan antara PAD yang dapat direalisasikan dengan jumlah seluruh pendapatan daerah pada satu tahun. Semakin tinggi persentase capaian berarti kinerja Badan Keuangan semakin *Baik*, demikian pula sebaliknya jika semakin rendah maka kinerja di nilai *Kurang Baik*.

Pada Renstra 2021-2026 target capaian kinerja pada awal periode adalah 8% sedangkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD adalah 13%. Dalam menentukan targetnya ini, Badan Keuangan menempuh berbagai cara. Adapun cara-cara tersebut antara lain adalah:

1. Melihat potensi wajib pajak daerah yang ada di wilayah Kota Bukittinggi
2. Pertumbuhan perolehan pajak daerah dimaksud dari tahun ke tahun.
3. Rata-rata penerimaan pajak daerah pada periode-periode sebelumnya.
4. Prediksi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang yang memiliki dampak langsung terhadap pemungutan pajak daerah.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Kebijakan Badan Keuangan**

Strategi merupakan ilmu, seni, langkah-langkah atau tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program utama yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sedangkan arah kebijakan merupakan perwujudan dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron dan konsisten. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan saran untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring maupun evaluasi.

Strategi dan arah kebijakan Badan Keuangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Keuangan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan dilakukan dengan mempedomani hasil analisa SWOT yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya. Dari identifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman analisa SWOT, dapat ditetapkan 3 (tiga) strategi yang akan digunakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan pada kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan, yaitu:

- 1) Peningkatan dan pengembangan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas
- 2) Peningkatan dan pengembangan tata kelola barang milik daerah
- 3) Peningkatan dan pengembangan manajemen pengelolaan pajak daerah

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan diatas perlu disusun arah kebijakan operasional sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya dapat

menjadi lebih terarah, terukur, efektif dan efisien. Adapun arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sinergitas antara dokumen perencanaan dengan penganggaran dalam penyusunan APBD
- 2) Meningkatkan sinergitas antara dokumen perencanaan dengan penganggaran dalam penyusunan APBD
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah dan informasi keuangan lainnya
- 4) Mengembangkan teknologi informasi keuangan dan aset daerah yang terintegrasi
- 5) Meningkatkan transparansi kesesuaian pengadaan barang milik daerah dengan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pelayanan public
- 6) Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah yang bernilai ekonomis
- 7) Mengoptimalkan inventarisasi barang milik daerah yang terdigitalisasi
- 8) Meningkatkan efektifitas pengawasan dan pengendalian barang milik daerah
- 9) Meningkatkan kualitas pelayanan yang optimal dan penyediaan sarana dan prasana pajak online
- 10) Meningkatkan masyarakat sadar pajak
- 11) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendataan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah

Untuk lebih jelasnya rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah Badan Keuangan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

**Tabel 5.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Visi	: Menciptakan Bukittinggi HEBAT, Berdasarkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah			
Misi	: Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan			
Tujuan	: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Sasaran	: Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih			
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih	Meningkatnya Efektifitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Peningkatan dan pengembangan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	Meningkatkan sinergitas antara dokumen perencanaan dengan penganggaran dalam penyusunan APBD
				Mengendalikan belanja daerah, penyerapan anggaran, dana transfer dan optimalisasi kas
				Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah dan informasi keuangan lainnya
				Mengembangkan teknologi informasi keuangan dan aset daerah yang terintegrasi
			Peningkatan dan Pengembangan tata kelola barang milik daerah	Meningkatkan transparansi kesesuaian pengadaan barang milik daerah dengan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pelayanan publik
				Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah yang bernilai ekonomis
				Mengoptimalkan inventarisasi barang milik daerah yang terdigitalisasi
				Meningkatkan efektifitas pengawasan dan pengendalian barang milik daerah
2	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah	Peningkatan dan pengembangan manajemen pengelolaan pajak daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan yang optimal dan penyediaan sarana dan prasana pajak online
				Meningkatkan masyarakat sadar pajak
				Intensifikasi dan ekstensifikasi pendataan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan strategi dan kebijakan selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi 2021 – 2026.

Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, adapun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- I. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
  1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
  2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
  3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah  
Lingkup Keuangan Daerah
- II. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
  1. Pengelolaan Barang Milik Daerah
- III. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
  1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
- IV. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disajikan menggunakan Table VI.1 sebagai berikut :

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasarna dan Pendanaan Indikatif**  
**Badan Keuangan Kota Bukittinggi**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran	100%	100%	1.516.975.804,00	100%	1.713.320.000,00	100%	2.037.684.000,00	100%	1.970.318.000,00	100%	1.798.986.000,00	100%	1.627.654.000,00	100%	10.664.937.804,00	BK	Bukittinggi
		2. Persentase dokumen penganggaran yang selesai tepat waktu	100%	100%															
		1. Persentase penyampaian informasi penatausahaan keuangan daerah tepat waktu	100%	100%	634.090.862,00	100%	1.125.480.000,00	100%	1.350.576.000,00	100%	1.294.302.000,00	100%	1.181.754.000,00	100%	1.069.206.000,00	100%	6.655.408.862,00	BK	Bukittinggi
		2. Persentase penyerapan dana transfer	100%	100%															
		3. Persentase penyerapan belanja daerah	100%	100%															
		1. Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP	100%	100%	764.442.908,00	100%	2.571.000.000,00	100%	3.085.200.000,00	100%	2.956.650.000,00	100%	2.699.550.000,00	100%	2.442.450.000,00	100%	14.519.292.908,00	BK	Bukittinggi
		2. Persentase informasi keuangan disampaikan tepat waktu																	
		Pengelolaan Keuangan sesuai aturan	100%	100%	35.620.000,00	100%	10.028.182.000,00	100%	12.033.818.400,00	100%	11.532.409.300,00	100%	10.529.591.100,00	100%	9.526.772.900,00	100%	53.686.393.700,00	BK	Bukittinggi
		Sistem terintegrasi	6 Bidang pengelolaan	6 Bidang pengelolaan	0,00	6 Bidang pengelolaan	260.000.000,00	6 Bidang pengelolaa n	312.000.000,00	6 Bidang pengelolaa n	299.000.000,00	6 Bidang pengelolaa n	358.800.000,00	6 Bidang pengelolaa n	247.000.000,00	6 Bidang pengelolaa n	1.476.800.000,00	BK	Bukittinggi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
5.02.02.2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1. Persentase nomenklatur kegiatan APBD sama dengan KUA PPAS 2. Persentase pengalokasian anggaran belanja sesuai aturan 3. Persentase kesesuaian penempatan rekening penganggaran 4. APBD ditetapkan sebelum tanggal 31 Desember	100%  100%  100%  YA	100%  100%  100%  YA	1.516.975.804,00	100%  100%  100%  YA	1.713.320.000,00	100%  100%  100%  YA	2.037.684.000,00	100%  100%  100%  YA	1.970.318.000,00	100%  100%  100%  YA	1.798.986.000,00	100%  100%  100%  YA	1.627.654.000,00	100%  100%  100%  YA	10.664.937.804,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA dan PPAS	0	2 Buku	322.082.598,00	2 Buku	354.290.000,00	2 Buku	425.148.000,00	2 Buku	407.433.500,00	2 Buku	372.004.500,00	2 Buku	336.575.500,00	10 Buku	2.217.534.098,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	0	2 Buku	278.146.000,00	2 Buku	305.960.000,00	2 Buku	367.152.000,00	2 Buku	351.854.000,00	2 Buku	321.258.000,00	2 Buku	290.662.000,00	10 Buku	1.915.032.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD diverifikasi	0	0	-	28 SKPD	35.000.000,00	28 SKPD	36.750.000,00	28 SKPD	40.250.000,00	28 SKPD	36.750.000,00	28 SKPD	33.250.000,00	28 SKPD	182.000.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD diverifikasi	0	0	-	28 SKPD	26.000.000,00	28 SKPD	27.300.000,00	28 SKPD	29.900.000,00	28 SKPD	27.300.000,00	28 SKPD	24.700.000,00	28 SKPD	135.200.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD diverifikasi	28 SKPD	28 SKPD	70.710.000,00	28 SKPD	35.000.000,00	28 SKPD	36.750.000,00	28 SKPD	40.250.000,00	28 SKPD	36.750.000,00	28 SKPD	33.250.000,00	28 SKPD	252.710.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA SKPD diverifikasi	0	0	-	28 SKPD	26.000.000,00	28 SKPD	27.300.000,00	28 SKPD	29.900.000,00	28 SKPD	27.300.000,00	28 SKPD	24.700.000,00	28 SKPD	135.200.000,00	BK	Bukittinggi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	SKPD																		
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1. Dokumen Perda APBD 2. Perwako APBD	1 Perda 1 Perwako	1 Perda 1 Perwako	355.700.000,00	1 Perda 1 Perwako	391.270.000,00	1 Perda 1 Perwako	469.524.000,00	1 Perda 1 Perwako	449.960.500,00	1 Perda 1 Perwako	410.833.500,00	1 Perda 1 Perwako	371.706.500,00	6 Perda 6 Perwako	2.448.994.500,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1. Dokumen Perda PAPBD 2. Dokumen Perwako PAPBD	1 Perda 1 Perwako	1 Perda 1 Perwako	333.395.000,00	1 Perda 1 Perwako	366.800.000,00	1 Perda 1 Perwako	440.160.000,00	1 Perda 1 Perwako	421.820.000,00	1 Perda 1 Perwako	385.140.000,00	1 Perda 1 Perwako	348.460.000,00	5 Perda 5 Perwako	2.295.775.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen Perwako Standar Satuan Harga	1 Dokumen	1 Dokumen	156.942.206,00	1 Dokumen	173.000.000,00	1 Dokumen	207.600.000,00	1 Dokumen	198.950.000,00	1 Dokumen	181.650.000,00	1 Dokumen	164.350.000,00	5 Dokumen	1.082.492.206,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen Evaluasi Anggaran Pendapatan	0	0		0	-	1 Dokumen	40.000.000,00	1 Dokumen	46.000.000,00	1 Dokumen	42.000.000,00	1 Dokumen	38.000.000,00	3 Dokumen	166.000.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen Evaluasi Anggaran Belanja	0	0		0	-	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	40.250.000,00	1 Dokumen	36.750.000,00	1 Dokumen	33.250.000,00	3 Dokumen	145.250.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen Evaluasi Anggaran Pembiayaan	0	0		0	-	1 Dokumen	28.000.000,00	1 Dokumen	32.200.000,00	1 Dokumen	29.400.000,00	1 Dokumen	26.600.000,00	3 Dokumen	116.200.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.2.01.1	Pembinaan Penganggaran Daerah	Sosialisasi/Bimtek Penyusunan Anggaran	0	0		0	-	50 peserta	35.000.000,00	50 peserta	40.250.000,00	50 peserta	36.750.000,00	50 peserta	33.250.000,00	150 peserta	145.250.000,00	BK	Bukittinggi

*Rencana Strategis Badan Keuangan 2021-2026*

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	n Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah perhitungan dan penyetoran potongan fihak ketiga (PFK) dan iuran pemda	168 penyetoran PFK	168 penyetoran PFK	33.700.000,00	168 penyetoran PFK	65.000.000,00	168 penyetoran PFK	78.000.000,00	168 penyetoran PFK	74.750.000,00	168 penyetoran PFK	68.250.000,00	168 penyetoran PFK	61.750.000,00	840 penyetoran PFK	381.450.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Jumlah transaksi kas daerah berupa pengeluaran kasda 2. Jumlah transaksi kas daerah deposito	7 Transaksi 5 Transaksi	7 Transaksi 5 Transaksi	45.741.000,00	7 Transaksi 5 Transaksi	70.000.000,00	7 Transaksi 5 Transaksi	84.000.000,00	7 Transaksi 5 Transaksi	80.500.000,00	7 Transaksi 5 Transaksi	73.500.000,00	7 Transaksi 5 Transaksi	66.500.000,00	21 Transaksi 25 Transaksi	420.241.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	Berita acara rekonsiliasi data penerimaan	12 Berita Acara	12 Berita Acara	55.240.000,00	12 Berita Acara	110.480.000,00	12 Berita Acara	132.576.000,00	12 Berita Acara	127.052.000,00	12 Berita Acara	116.004.000,00	12 Berita Acara	104.956.000,00	60 Berita Acara	646.308.000,00	BK	Bukittinggi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Perwako Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	0	0	-	1 Perwako	125.000.000,00	1 Perwako	150.000.000,00	1 Perwako	143.750.000,00	1 Perwako	131.250.000,00	1 Perwako	118.750.000,00	4 Perwako	668.750.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen SP2D SKPD selain gaji	2.000 SP2D	2000 SP2D	304.894.908,00	2000 SP2D	330.000.000,00	2000 SP2D	396.000.000,00	2000 SP2D	379.500.000,00	2000 SP2D	346.500.000,00	2000 SP2D	313.500.000,00	10.000 SP2D	2.070.394.908,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.2.03	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1. Jumlah temuan BPK terhadap LKPD 2. Penyampaian laporan keuangan sebelum tanggal 20 setiap bulannya 3. Penyampaian LKPD ke BPK sebelum 31 Maret 4. Jumlah temuan BPK yang dapat ditindaklanjuti dari semua temuan pra opini	0 YA YA 100%	0 YA YA 100%	764.442.908,00	100%	2.571.000.000,00	100%	3.085.200.000,00	100%	2.956.650.000,00	100%	2.699.550.000,00	100%	2.442.450.000,00	100%	14.519.292.908,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	0	0	-	12 Laporan	110.000.000,00	12 Laporan	132.000.000,00	12 Laporan	126.500.000,00	12 Laporan	115.500.000,00	12 Laporan	104.500.000,00	48 Laporan	588.500.000,00	BK	Bukittinggi



Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permenda gri 90/2019 yang disempurn akan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKP D Pen angg ung jawa b	Lok asi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Pengeluara n Kas Daerah																		
5.02. 02.2. 03.0 2	Rekonsilias i dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan , Belanja, Pembiayaa n, Pendapatan -LO dan Beban	Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan dan Aset Daerah	28 SKPD	28 SKPD	56.240.000,00	28 SKPD	105.000.000,00	28 SKPD	126.000.000,00	28 SKPD	120.750.000,00	28 SKPD	110.250.000,00	28 SKPD	99.750.000,00	28 SKPD	617.990.000,00	BK	Buki ting gi
5.02. 02.2. 03.0 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggun gjawaban Pelaksanaa n APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1. Jumlah Informasi Keuangan Daerah yang disusun 2. Laporan Keuangan semester 1 3. Prognosis 6 bulan berikutnya	12 Informasi 1 Laporan 1 Laporan	12 Informasi 1 Laporan 1 Laporan	154.875.658,00	12 Informasi 1 Laporan 1 Laporan	190.000.000,00	12 Informasi 1 Laporan 1 Laporan	228.000.000,00	12 Informasi 1 Laporan 1 Laporan	218.500.000,00	12 Informasi 1 Laporan 1 Laporan	199.500.000,00	12 Informasi 1 Laporan 1 Laporan	180.500.000,00	60 Informasi 5 Laporan 5 Laporan	1.171.375.658,00	BK	Buki ting gi
5.02. 02.2. 03.0 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Berita Acara Konsolidasi Laporan Keuangan	0	0	-	28 SKPD, 8 BLUD, 1 LKPD	110.000.000,00	28 SKPD, 8 BLUD, 1 LKPD	132.000.000,00	28 SKPD, 8 BLUD, 1 LKPD	126.500.000,00	28 SKPD, 8 BLUD, 1 LKPD	115.500.000,00	28 SKPD, 8 BLUD, 1 LKPD	104.500.000,00	28 SKPD, 8 BLUD, 4 LKPD	588.500.000,00	BK	Buki ting gi
5.02. 02.2. 03.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggun gjawaban Pelaksanaa n APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Peniabaran	1. Perda Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD 2. Perwako Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	1 Perda  1 Perwako	1 Perda  1 Perwako	488.667.000,00	1 Perda  1 Perwako	550.000.000,00	1 Perda  1 Perwako	660.000.000,00	1 Perda  1 Perwako	632.500.000,00	1 Perda  1 Perwako	577.500.000,00	1 Perda  1 Perwako	522.500.000,00	5 Perda  5 Perwako	3.431.167.000,00	BK	Buki ting gi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota																		
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Tindak Lanjut LHP BPK	0	0	-	1 Dokumen	106.000.000,00	1 Dokumen	127.200.000,00	1 Dokumen	121.900.000,00	1 Dokumen	111.300.000,00	1 Dokumen	100.700.000,00	4 Dokumen	567.100.000,00	BK	Bukittingi
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Laporan TP-TGR	0	0	-	80% TPTGR	110.000.000,00	80% TPTGR	132.000.000,00	80% TPTGR	126.500.000,00	80% TPTGR	115.500.000,00	80% TPTGR	104.500.000,00	80% TPTGR	588.500.000,00	BK	Bukittingi
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Prosedur Analisis LPP APBD	0	0	-	1 Dokumen	105.000.000,00	1 Dokumen	126.000.000,00	1 Dokumen	120.750.000,00	1 Dokumen	110.250.000,00	1 Dokumen	99.750.000,00	4 Dokumen	561.750.000,00	BK	Bukittingi
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Perwako Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Gar APD	0	0	-	1 Perwako	110.000.000,00	1 Perwako	132.000.000,00	1 Perwako	126.500.000,00	1 Perwako	115.500.000,00	1 Perwako	104.500.000,00	4 Perwako	588.500.000,00	BK	Bukittingi
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan	Sisdur Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerinta Daerah	0	0	-	1 Dokumen	110.000.000,00	1 Dokumen	132.000.000,00	1 Dokumen	126.500.000,00	1 Dokumen	115.500.000,00	1 Dokumen	104.500.000,00	4 Dokumen	588.500.000,00	BK	Bukittingi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Keuangan Pemerintah Daerah																		
5.02.02.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Dokumen Laporan Keuangan yang disusun sesuai SAP	6 Laporan	6 Laporan	64.660.250,00	6 Laporan	700.000.000,00	6 Laporan	840.000.000,00	6 Laporan	805.000.000,00	6 Laporan	735.000.000,00	6 Laporan	665.000.000,00	30 Laporan	3.809.660.250,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota	Sosialisasi/Bimtek pengelolaan keuangan BLUD	0	0	-	8 BLUD	160.000.000,00	8 BLUD	192.000.000,00	8 BLUD	184.000.000,00	8 BLUD	168.000.000,00	8 BLUD	152.000.000,00	8 BLUD	856.000.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.03.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah an Daerah	Laporan Statistik KPD	0	0	-	1 Dokumen	105.000.000,00	1 Dokumen	126.000.000,00	1 Dokumen	120.750.000,00	1 Dokumen	110.250.000,00	1 Dokumen	99.750.000,00	4 Dokumen	561.750.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.04	Kegiatan Pemunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan sesuai aturan	100%	100%	35.620.000,00	100%	10.028.182.000,00	100%	12.033.818.400,00	100%	11.532.409.300,00	100%	10.529.591.100,00	100%	9.526.772.900,00	100%	53.686.393.700,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.04.01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Laporan pengelolaan dana cadangan			-	2 laporan	28.182.000,00	2 laporan	33.818.400,00	2 laporan	32.409.300,00	2 laporan	29.591.100,00	2 laporan	26.772.900,00	8 laporan	150.773.700,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.04.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Data investasi pemerintah daerah			-	1 Dokumen	105.000.000,00	1 Dokumen	126.000.000,00	1 Dokumen	120.750.000,00	1 Dokumen	110.250.000,00	1 Dokumen	99.750.000,00	4 Dokumen	561.750.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.04.03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Data Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah			-	2 laporan	28.182.000,00	2 laporan	33.818.400,00	2 laporan	32.409.300,00	2 laporan	29.591.100,00	2 laporan	26.772.900,00	8 laporan	150.773.700,00	BK	Bukittinggi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Data Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			-	1 Laporan	110.000.000,00	1 Laporan	132.000.000,00	1 Laporan	126.500.000,00	1 Laporan	115.500.000,00	1 Laporan	104.500.000,00	4 Laporan	588.500.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.2.04.05	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Data Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			-	1 Dokumen	105.000.000,00	1 Dokumen	126.000.000,00	1 Dokumen	120.750.000,00	1 Dokumen	110.250.000,00	1 Dokumen	99.750.000,00	4 Dokumen	561.750.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.2.04.06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Data Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			-	1 Laporan	110.000.000,00	1 Laporan	132.000.000,00	1 Laporan	126.500.000,00	1 Laporan	115.500.000,00	1 Laporan	104.500.000,00	4 Laporan	588.500.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.2.04.07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Kebijakan dan alokasi subsidi disusun			-	2 laporan	28.182.000,00	2 laporan	33.818.400,00	2 laporan	32.409.300,00	2 laporan	29.591.100,00	2 laporan	26.772.900,00	8 laporan	150.773.700,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan analisis penyaluran bantuan keuangan	2 laporan	2 laporan	25.620.000,00	2 laporan	28.182.000,00	2 laporan	33.818.400,00	2 laporan	32.409.300,00	2 laporan	29.591.100,00	2 laporan	26.772.900,00	10 laporan	176.393.700,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dana Darurat dan mendasak tersedia	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	1 Tahun	10.000.000.000,00	1 Tahun	12.000.000.000,00	1 Tahun	11.500.000.000,00	1 Tahun	10.500.000.000,00	1 Tahun	9.500.000.000,00	5 Tahun	53.510.000.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Laporan dana bagi hasil			-	1 Laporan	110.000.000,00	1 Laporan	132.000.000,00	1 Laporan	126.500.000,00	1 Laporan	115.500.000,00	1 Laporan	104.500.000,00	4 Laporan	588.500.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.02.2.05	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah	Sistem terintegrasi	6 Bidang pengelolaa n	6 Bidang pengelolaa n	-	6 Bidang pengelolaa n	260.000.000,00	6 Bidang pengelolaa n	312.000.000,00	6 Bidang pengelolaa n	299.000.000,00	6 Bidang pengelolaa n	358.800.000,00	6 Bidang pengelolaa n	247.000.000,00	6 Bidang pengelolaa n	1.476.800.000,00	BK	Bukittinggi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	h Daerah Lingkup Keuangan Daerah																		
5.02. 02.2. 05.0 1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Laporan Data Keuangan			-	1 Laporan	35.000.000,00	1 Laporan	37.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	45.000.000,00	1 Laporan	33.250.000,00	4 Laporan	200.250.000,00	BK	Bukittinggi
5.02. 02.2. 05.0 2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Sistem terintegrasi			-	6 Bidang pengelolaan	260.000.000,00	6 Bidang pengelolaan	312.000.000,00	6 Bidang pengelolaan	299.000.000,00	6 Bidang pengelolaan	358.800.000,00	6 Bidang pengelolaan	247.000.000,00	6 Bidang pengelolaan	1.476.800.000,00	BK	Bukittinggi
5.02. 02.2. 05.0 3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Bimtek SIPD terlaksana			-	28 SKPD	155.000.000,00	28 SKPD	155.000.000,00	28 SKPD	155.000.000,00	-		-		28 SKPD	465.000.000,00	BK	Bukittinggi
5.02. 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1. Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dimanfaatkan dan dipindahtangankan terhadap PAD 2. Jumlah temuan pemeriksaan terhadap BMD 3. Jumlah informasi data pengelolaan BMD	0,5%  0 12 jenis	0,1%  0 12 jenis	1.991.186.408,00	100%	2.755.631.000,00	100%	3.306.757.200,00	100%	3.168.975.650,00	100%	3.998.270.780,00	100%	2.763.324.450,00	100%	18.154.145.488,00	BK	Bukittinggi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
5.02.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Persentase kesesuaian data BMD dengan fisiknya	100%	100%	1.991.186.408,00	100%	2.755.631.000,00	100%	3.306.757.200,00	100%	3.168.975.650,00	100%	3.998.270.780,00	100%	2.763.324.450,00	100%	18.154.145.488,00	BK	Bukittinggi
		2. Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dimanfaatkan terhadap PAD	0,5%	0,1%															
		3. Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dipindahtangankan terhadap PAD	0,5%	0,1%															
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Buku standar harga barang dan jasa yang disusun	1 buku		110.543.750,00	1 buku	122.000.000,00	1 buku	146.400.000,00	1 buku	140.300.000,00	1 buku	168.360.000,00	1 buku	115.900.000,00	5 buku	803.503.750,00	BK	Bukittinggi
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen standar sarana dan prasarana disusun		0,5%	-	-	1 Dokumen	110.000.000,00		-	1 Dokumen	126.500.000,00	1 Dokumen	145.475.000,00	3 Dokumen	381.975.000,00	BK	Bukittinggi	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1. Dokumen RKBMD 2. Dokumen RKPBM	1 Buku 1 Buku		13.849.500,00	1 Buku 1 Buku	15.500.000,00	1 Buku 1 Buku	18.600.000,00	1 Buku 1 Buku	17.825.000,00	1 Buku 1 Buku	21.390.000,00	1 Buku 1 Buku	14.725.000,00	5 Buku 5 Buku	101.889.500,00	BK	Bukittinggi
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kebijakan pengelolaan BMD disusun			-		-	1Dokumen	60.000.000,00		-	1 Dokumen	69.000.000,00		-	2 Dokumen	129.000.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah pengurus barang yang dibayarkan honorinya	145 orang	0,5%	1.323.962.204,00	145 orang	1.500.000.000,00	145 orang	1.800.000.000,00	145 orang	1.725.000.000,00	145 orang	2.070.000.000,00	145 orang	1.425.000.000,00	145 orang	9.843.962.204,00	BK	Bukittinggi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah data BMD yang diinventarisir	28 laporan	28 laporan	144.988.000,00	28 laporan	160.000.000,00	28 laporan	192.000.000,00	28 laporan	184.000.000,00	28 laporan	220.800.000,00	28 laporan	152.000.000,00	140 laporan	1.053.788.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah sertifikat balik nama yang diterbitkan	10 sertifikat	10 sertifikat	39.453.000,00	10 sertifikat	50.000.000,00	10 sertifikat	60.000.000,00	10 sertifikat	57.500.000,00	10 sertifikat	69.000.000,00	10 sertifikat	47.500.000,00	50 sertifikat	323.453.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	1. Penilaian BMD dimanfaatkan 2. Penilaian BMD dipindahyangankan 3. Penilaian BMD belum tercatat	0	0	-	3 Penilaian	75.000.000,00	3 Penilaian	90.000.000,00	3 Penilaian	86.250.000,00	3 Penilaian	103.500.000,00	3 Penilaian	71.250.000,00	12 Penilaian	426.000.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. BMD yang dipindatanganan 2. BMD yang diawasi 3. BMD yang dapat dikendalikan	2 Jenis 1 Laporan 1 Laporan	2 Jenis 1 Laporan 1 Laporan	203.694.954,00	2 Jenis 1 Laporan 1 Laporan	250.000.000,00	2 Jenis 1 Laporan 1 Laporan	300.000.000,00	2 Jenis 1 Laporan 1 Laporan	287.500.000,00	2 Jenis 1 Laporan 1 Laporan	345.000.000,00	2 Jenis 1 Laporan 1 Laporan	237.500.000,00	2 Jenis 5 Laporan 5 Laporan	1.623.694.954,00	BK	Bukittinggi
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1. Jumlah penetapan status pengguna barang milik daerah 2. Jumlah pengalihan status pengguna sementara barang milik daerah 3. Jumlah objek pemanfaatann aset 4. Jumlah HGB diatas HPL yang tertata	29 penetapan status 50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai 29 status pengalihan 76 HGB diatas HPL	29 penetapan status 50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai 29 status pengalihan 76 HGB diatas HPL	88.240.000,00	29 penetapan status 50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai 29 status pengalihan 76 HGB diatas HPL	110.000.000,00	29 penetapan status 50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai 29 status pengalihan 76 HGB diatas HPL	132.000.000,00	29 penetapan status 50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai 29 status pengalihan 76 HGB diatas HPL	126.500.000,00	29 penetapan status 50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai 29 status pengalihan 76 HGB diatas HPL	151.800.000,00	29 penetapan status 50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai 29 status pengalihan 76 HGB diatas HPL	104.500.000,00	29 penetapan status 50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai 29 status pengalihan 76 HGB diatas HPL	713.040.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi Barang	2 Kali	2 Kali	7.245.000,00	2 Kali	8.000.000,00	2 Kali	9.600.000,00	2 Kali	9.200.000,00	2 Kali	11.040.000,00	2 Kali	7.600.000,00	10 Kali	52.685.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD tahunan	4 laporan	4 laporan	59.210.000,00	4 laporan	65.131.000,00	4 laporan	78.157.200,00	4 laporan	74.900.650,00	4 laporan	89.880.780,00	4 laporan	61.874.450,00	20 laporan	429.154.080,00	BK	Bukittinggi
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik	Sosialisasi/Bimtek /Rekonsiliasi Pengelolaan BMD	0	0	-	3 Kali	400.000.000,00	3 Kali	480.000.000,00	3 Kali	460.000.000,00	3 Kali	552.000.000,00	3 Kali	380.000.000,00	12 Kali	2.272.000.000,00	BK	Bukittinggi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota																		
5.02.04	PROGR M PENGE LOAAN PENDAP ATAN DAERAH	1. Persentase Pajak Tertagih 2. Jumlah penambahan objek pajak baru 3. Jumlah jenis pajak memakai sistem online 4. Persentase piutang pajak yang dapat ditagih 5. Persentase peningkatan pajak daerah 6. Persentase peningkatan retribusi daerah 7. Persentase penerimaan lain- lain PAD yang sah	100% 10 objek  17 data online  100%  20%  20%  100%	100% 10 objek  17 data online  100%  20%  20%  100%	1.215.994.290,00	100% 2.875.751.000,00	100% 2.972.341.200,00	100% 3.389.131.650,00	100% 4.026.036.380,00	100% 2.839.085.450,00	100% 17.846.899.970,00	BK	Bukit tinggi						
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengeloaan pendapatan Daerah	1. Persentase Pajak Tertagih 2. Jumlah penambahan objek pajak baru 3. Jumlah jenis pajak memakai sistem online 4. Persentase piutang pajak yang dapat ditagih 5. Persentase peningkatan pajak daerah 6. Persentase peningkatan retribusi daerah 7. Persentase penerimaan lain- lain PAD yang sah	100% 10 objek  17 data online  100%  20%  20%  100%	100% 10 objek  17 data online  100%  20%  20%  100%	1.215.994.290,00	100% 2.875.751.000,00	100% 2.972.341.200,00	100% 3.389.131.650,00	100% 4.026.036.380,00	100% 2.839.085.450,00	100% 17.846.899.970,00	BK	Bukit tinggi						
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah	0	0	-	-	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.750.000,00	1 Dokumen	17.250.000,00	1 Dokumen	14.250.000,00	3 Dokumen	62.250.000,00	BK	Bukit tinggi	



Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Data Potensi Pajak	0	0	-	4 Jenis Pajak	61.340.000,00	4 Jenis Pajak	73.608.000,00	4 Jenis Pajak	70.541.000,00	4 Jenis Pajak	84.649.200,00	4 Jenis Pajak	58.273.000,00	4 Jenis Pajak	348.411.200,00	BK	Bukittinggi
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan, sosialisasi, dilaksanakan	0	0	-	1 Paket	35.000.000,00	1 Paket	37.000.000,00	1 Paket	40.250.000,00	1 Paket	42.550.000,00	1 Paket	33.250.000,00	4 paket	188.050.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Server, Software, hardware	0	0	-	6 Jenis	642.611.000,00	6 Jenis	771.133.200,00	6 Jenis	739.002.650,00	6 Jenis	886.803.180,00	6 Jenis	610.480.450,00	24 Jenis	3.650.030.480,00	BK	Bukittinggi
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Objek Pajak Baru	10 Objek	10 Objek	206.271.308,00	10 Objek	113.000.000,00	10 Objek	135.600.000,00	10 Objek	129.950.000,00	10 Objek	155.940.000,00	10 Objek	107.350.000,00	50 Objek	848.111.308,00	BK	Bukittinggi
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Data Pajak Online Terintegrasi	10 Data Online	10 Data Online	11.810.000,00	10 Data Online	15.000.000,00	10 Data Online	18.000.000,00	10 Data Online	17.250.000,00	10 Data Online	20.700.000,00	10 Data Online	14.250.000,00	50 Data Online	97.010.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Termutakhirkan Data PBB P2	7500 Objek PBB P2	7500 Objek PBB P2	62.351.500,00	7500 Objek PBB P2	223.840.000,00	7500 Objek PBB P2	268.608.000,00	7500 Objek PBB P2	257.416.000,00	7500 Objek PBB P2	308.899.200,00	7500 Objek PBB P2	212.648.000,00	37500 Objek PBB P2	1.333.762.700,00	BK	Bukittinggi
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	SPPT, SKPD, SKPDKB/SKPD diterbitkan	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPDKB/S	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPDKB/S	212.867.908,00	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPDKB/S	181.900.000,00	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPDKB/S	218.280.000,00	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPDKB/S	209.185.000,00	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPDKB/S	251.022.000,00	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPDKB/S	172.805.000,00	15000 SPPT, 7500 SKPD, 500 SKPDKB/S	1.246.059.908,00	BK	Bukittinggi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			KPDKBT/S KPDN	KPDKBT/S KPDN		KPDKBT/S KPDN		KPDKBT/S KPDN		KPDKBT/S KPDN		KPDKBT/S KPDN		KPDKBT/S KPDN		KPDKBT/S KPDN			
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks pelayanan	0		-	B	181.900.000,00	B	218.280.000,00	B	229.194.000,00	B	251.022.000,00	A	207.366.000,00	A	1.087.762.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Data pelaporan pajak terverifikasi	5 Laporan		-	1 Laporan	181.900.000,00	1 Laporan	218.280.000,00	1 Laporan	229.194.000,00	1 Laporan	251.022.000,00	1 Laporan	207.366.000,00	4 Laporan	1.087.762.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Penagihan Pajak	5 Laporan	1 Laporan	665.527.674,00	1 Laporan	1.000.000.000,00	1 Laporan	1.200.000.000,00	1 Laporan	1.150.000.000,00	1 Laporan	1.380.000.000,00	1 Laporan	950.000.000,00	5 Laporan	6.345.527.674,00	BK	Bukittinggi
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kasus keberatan pajak terselesaikan	5 Laporan		-		-	1 Laporan	15.000.000,00		-	1 Laporan	17.250.000,00		-	2 Laporan	32.250.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Berita Acara Pemeriksaan	50 Berita Acara	10 Berita Acara	57.165.900,00	10 Berita Acara	239.260.000,00	10 Berita Acara	287.112.000,00	10 Berita Acara	275.149.000,00	10 Berita Acara	330.178.800,00	10 Berita Acara	227.297.000,00	50 Berita Acara	1.416.162.700,00		Bukittinggi
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1. Laporan pengelolaan rumah dinas 2. SKPD penghasil yang terkoordinir	0	0	-	0	-	1 Laporan 14 SKPD	25.000.000,00	1 Laporan 14 SKPD	26.250.000,00	1 Laporan 14 SKPD	28.750.000,00	1 Laporan 14 SKPD	23.750.000,00	3 Laporan 14 SKPD	103.750.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	A	A	13.102.196.675,00	A	13.961.070.000,00	A	16.753.284.000,00	A	18.979.450.500,00	A	22.775.340.600,00	A	15.678.676.500,00	A	107.900.511.092,00	BK	Bukittinggi Bukittinggi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program dan kegiatan yang selaras	100%	100%	22.039.950,00	100%	27.500.000,00	100%	33.000.000,00	100%	31.625.000,00	100%	37.950.000,00	100%	26.125.000,00	100%	31.350.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	22.039.950,00	2 Dokumen	27.500.000,00	2 Dokumen	33.000.000,00	2 Dokumen	31.625.000,00	2 Dokumen	37.950.000,00	2 Dokumen	26.125.000,00	10 Dokumen	31.350.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal	100%	100%	11.740.725.266,00	100%	12.000.000.000,00	100%	14.400.000.000,00	100%	13.800.000.000,00	100%	16.560.000.000,00	100%	11.400.000.000,00	100%	79.900.725.266,00	BK	Bukittinggi
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	78 orang	78 orang	11.740.725.266,00	78 orang	12.000.000.000,00	78 orang	14.400.000.000,00	78 orang	13.800.000.000,00	78 orang	16.560.000.000,00	78 orang	11.400.000.000,00	78 orang	79.900.725.266,00	BK	Bukittinggi
5.02.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal	100%	100%	216.740.000,00	100%	266.740.000,00	100%	320.088.000,00	100%	2.182.171.000,00	100%	2.618.605.200,00	100%	1.802.663.000,00	100%	11.698.743.313,00	BK	Bukittinggi
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah uni yang dilakukan penjagaan	1 Unit	1 Unit	216.740.000,00	1 Unit	266.740.000,00	1 Unit	320.088.000,00	1 Unit	306.751.000,00	1 Unit	368.101.200,00	1 Unit	253.403.000,00	1 Unit	1.731.823.200,00	BK	Bukittinggi
5.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal	100%	100%	0,00	100%	60.900.000,00	100%	73.080.000,00	100%	1.118.835.000,00	100%	1.342.602.000,00	100%	924.255.000,00	100%	6.025.318.654,00	BK	Bukittinggi
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	87 stel	0	-	87 stel	60.900.000,00	87 stel	73.080.000,00	87 stel	70.035.000,00	87 stel	84.042.000,00	87 stel	57.855.000,00	348 stel	69.426.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Peranekat	Kualitas pelayanan internal	100%	100%	478.473.459,00	100%	593.500.000,00	100%	712.200.000,00	100%	682.525.000,00	100%	819.030.000,00	100%	563.825.000,00	100%	3.849.553.459,00	BK	Bukittinggi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penganggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Daerah																		
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	2.742.000,00	3 Jenis	3.500.000,00	3 Jenis	4.200.000,00	3 Jenis	4.025.000,00	3 Jenis	4.830.000,00	3 Jenis	3.325.000,00	3 Jenis	22.622.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan	46 jenis;	46 jenis;	29.686.000,00	46 jenis;	50.000.000,00	46 jenis;	60.000.000,00	46 jenis;	57.500.000,00	46 jenis;	69.000.000,00	46 jenis;	47.500.000,00	46 jenis;	313.686.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Karcis, Bill, Blanko, STS, TTUK dan surat pengujian tercetak 2. Jumlah Barang cetakan keperluan kantor yang disediakan 3. Jumlah Fotocopy	8 Jenis 10 Jenis 70.000 Lembar	8 Jenis 12 Bulan 70.000 Lembar	264.831.195,00	8 Jenis 12 Bulan 70.000 Lembar	265.000.000,00	8 Jenis 12 Bulan 70.000 Lembar	318.000.000,00	8 Jenis 12 Bulan 70.000 Lembar	304.750.000,00	8 Jenis 12 Bulan 70.000 Lembar	365.700.000,00	8 Jenis 12 Bulan 70.000 Lembar	251.750.000,00	8 Jenis 60 Bulan 350.000 Lembar	1.770.031.195,00	BK	Bukittinggi
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1. Snack tamu 2. Makanan ringan pimpinan yang disediakan 3. Makan dan minum pendampingan pemeriksaan yang disediakan	500 Porsi 12 Bulan 60 Hari	500 Porsi 12 Bulan 60 Hari	24.970.000,00	500 Porsi 12 Bulan 70 Hari	25.000.000,00	500 Porsi 12 Bulan 70 Hari	30.000.000,00	500 Porsi 12 Bulan 70 Hari	28.750.000,00	500 Porsi 12 Bulan 70 Hari	34.500.000,00	500 Porsi 12 Bulan 70 Hari	23.750.000,00	2.500 Porsi 60 Bulan 340 Hari	166.970.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi 2. Makanan dan minuman rapat dan lembur tersedia	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bualn	156.244.264,00	12 Bulan 12 Bualn	250.000.000,00	12 Bulan 12 Bualn	300.000.000,00	12 Bulan 12 Bualn	287.500.000,00	12 Bulan 12 Bualn	345.000.000,00	12 Bulan 12 Bualn	237.500.000,00	60 Bulan 60 Bulan	1.576.244.264,00	BK	Bukittinggi
5.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas pelayanan internal	100%		0,00	100%	170.000.000,00	100%	204.000.000,00	100%	195.500.000,00	100%	234.600.000,00	100%	161.500.000,00	100%	965.600.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kursi eselon III, Kursi eselon IV, kursi rapat, meja eselon III, lemari/rak arsip tersedia	0	0	-	1 paket	60.000.000,00	1 paket	72.000.000,00	1 paket	69.000.000,00	1 paket	82.800.000,00	1 paket	57.000.000,00	4 paket	340.800.000,00	BK	Bukittinggi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laptop, komputer, CCTV	0	0	-	3 unit, 5 unit, 1 set	110.000.000,00	3 unit, 5 unit, 1 set	132.000.000,00	3 unit, 5 unit, 1 set	126.500.000,00	3 unit, 5 unit, 1 set	151.800.000,00	3 unit, 5 unit, 1 set	104.500.000,00	12 unit, 20 unit, 4 set	624.800.000,00		Bukittinggi
5.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas pelayanan internal	100%	100%	144.290.000,00	100%	152.000.000,00	100%	182.400.000,00	100%	174.800.000,00	100%	209.760.000,00	100%	144.400.000,00	100%	1.007.650.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Materai 2. Paket pengiriman tersedia	150 lembar 1 Tahun	150 lembar 1 Tahun	1.660.000,00	150 lembar 1 Tahun	2.000.000,00	150 lembar 1 Tahun	2.400.000,00	150 lembar 1 Tahun	2.300.000,00	150 lembar 1 Tahun	2.760.000,00	150 lembar 1 Tahun	1.900.000,00	750 lembar 5 Tahun	13.020.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, telp, air, fax/internet, TV kabel terbayarkan	12 Bulan	12 Bulan	142.630.000,00	12 Bulan	150.000.000,00	12 Bulan	180.000.000,00	12 Bulan	172.500.000,00	12 Bulan	207.000.000,00	12 Bulan	142.500.000,00	60 Bulan	994.630.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas pelayanan internal	100%	100%	499.928.000,00	100%	690.430.000,00	100%	828.516.000,00	100%	793.994.500,00	100%	952.793.400,00	100%	655.908.500,00	100%	4.421.570.400,00	BK	Bukittinggi
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	42.430.000,00	1 unit	42.430.000,00	1 unit	50.916.000,00	1 unit	48.794.500,00	1 unit	58.553.400,00	1 unit	40.308.500,00	1 unit	283.432.400,00	BK	Bukittinggi
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang dipelihara	39 unit	39 unit	197.990.000,00	39 unit	243.000.000,00	39 unit	291.600.000,00	39 unit	279.450.000,00	39 unit	335.340.000,00	39 unit	230.850.000,00	39 unit	1.578.230.000,00	BK	Bukittinggi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Dinas Operasional atau Lapangan																		
5.02.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Laptop, komputer, printer dan peralatan kantor lainnya terpelihara	30 unit	0	-	30 unit	20.000.000,00	30 unit	24.000.000,00	30 unit	23.000.000,00	30 unit	27.600.000,00	30 unit	19.000.000,00	30 unit	113.600.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Genset dan mesin perforasi	2 unit	2 unit	16.310.000,00	2 unit	24.000.000,00	2 unit	28.800.000,00	2 unit	27.600.000,00	2 unit	33.120.000,00	2 unit	22.800.000,00	2 unit	152.630.000,00	BK	Bukittinggi
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	243.198.000,00	1 gedung	361.000.000,00	1 gedung	433.200.000,00	1 gedung	415.150.000,00	1 gedung	498.180.000,00	1 gedung	342.950.000,00	1 gedung	2.293.678.000,00	BK	Bukittinggi

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN FUNGSI PENUNJANG

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bab ini akan dikemukakan indikator kinerja Utama SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang dalam kurun waktu (2016-2021) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 7.1 berikut ini.

**Tabel 7.1.**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada**  
**Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No ·	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Integritas Pemerintah Daerah	75%	75%	76%	76%	77%	77%	78%	78%
2	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	18,83%	18,89%	21,91%	19,86%	20,29%	20,53%	20,79%	20,79%

Dari tabel diatas, sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Misi Kelima Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan, yang mana tujuan yang akan dicapai dalam misi ini adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, sebagai alat ukur sasaran ini adalah Indeks Integritas Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan capaian keberhasilan Misi Kelima ini maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan pada Renstra 2021 – 2026 adalah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah. Opini WTP berarti laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi keuangan entitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai UU Nomor 15 tahun 2004

tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, bahwa opini merupakan pernyataan profesional keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, efektivitas sistem pengendalian internal dan kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*). Opini WTP diberikan dengan kriteria yang jelas dan pemeriksaan dilakukan sesuai standar pemeriksaan keuangan (*best practices*).

Indikator Kinerja Kedua pada RPJMD adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Sasaran Indikator Kinerja Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah (*otonomi fiskal*) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak sebagai sumber pendapatan daerah dan yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan sasaran RPJMD ini, Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan Badan Keuangan adalah Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah terhadap seluruh Pendapatan Daerah baik berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Pinjaman yang dikelola oleh Badan Keuangan. PAD dan Dana Perimbangan merupakan sumber pengeluaran pemerintah daerah yang berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah suatu daerah.



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Keuangan Kota Bukittinggi, merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Kota Bukittinggi selama periode 2021-2026, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Bukittinggi 2021-2026.

Renstra ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgent dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

Renstra Badan Keuangan Kota Bukittinggi merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Badan Keuangan Kota Bukittinggi, dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Kota Bukittinggi, yang merupakan rencana tahunan Badan Keuangan Kota Bukittinggi selama periode lima tahun, 2021 - 2026 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Renstra Badan Keuangan Kota Bukittinggi, diterbitkan melalui peraturan walikota dan surat keputusan Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi, yang di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Walikota dan Wakil Walikota, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Bukittinggi.

Pelaksanaan Renstra Badan Keuangan sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Akhir kata harapan kami semua yang dituangkan dalam dokumen Renstra ini dapat diwujudkan dan dokumen ini dapat menjadi pedoman dan bahan evaluasi untuk perencanaan tahap selanjutnya.

Kepala Badan Keuangan



**HERRIMAN, SH.M.Hum**

NIP. 6680525 199308 1001